

## **BAB 2**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat**

###### **a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pengertian pemberdayaan Menurut Sumaryadi (2005, hlm. 11 "upaya mempersiapkan masyarakat disertai langkah-langkah penguatan kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".

Suaib (2023) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah gagasan pertumbuhan ekonomi yang merangkum cita-cita sosial. "Berpusat pada masyarakat (diarahkan pada masyarakat), partisipatif (partisipasi), dan berkelanjutan (kemampuan untuk terus hidup)" adalah paradigma baru pembangunan yang dilambangkan oleh gagasan ini. Gagasan ini lebih dari sekadar menyediakan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap penyebaran kemiskinan (jaring pengaman). Namun demikian, ciri-ciri pendekatan yang dapat digunakan dalam konteks pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat sendiri yang harus mengambil inisiatif dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutanannya.
- 2) Memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) Menerima keragaman lokal, sehingga sangat mudah beradaptasi dan sesuai dengan kondisi.
- 4) Menyoroti proses pembelajaran sosial.
- 5) Proses menciptakan jaringan antara LSM konvensional, LSM otonom dan lembaga birokrasi.

Strategi berikut ini diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik pendekatan ini:

- 1) Upaya penargetan diperlukan. Hal ini terkadang disebut sebagai keberpihakan, dan secara langsung menargetkan masyarakat yang kurang mampu dengan program-program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Masyarakat yang menjadi sasaran harus berpartisipasi langsung dalam program atau bahkan melaksanakannya. Salah satu tujuan utama melibatkan masyarakat yang akan dibantu adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif, menghargai kebutuhan dan kapasitas mereka, dan sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, hal ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memperoleh keahlian dalam merencanakan, mengawasi, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas usaha-usaha mereka dalam pengembangan ekonomi dan pribadi.
- 3) Mengambil pendekatan kelompok, karena masyarakat miskin sulit untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan menangani masalah mereka satu per satu akan memperluas jangkauan bantuan. Oleh karena itu, kerja sama tim merupakan strategi yang paling efektif, dan penggunaan sumber daya juga menunjukkan hal ini.

Tiga pilar pemberdayaan masyarakat-memungkinkan, memberdayakan, dan melindungi-dapat dilihat dari cara memberdayakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya di Bab I. Dengan cara ini, tujuan akhirnya adalah menyatukan masyarakat, mengembangkan, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk bergerak menuju cara hidup yang lebih adil dan berkualitas lebih baik (Suaib, 2023:109-1111).

#### **b. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Delivery dalam Adita Maya Safira, dkk. (2019, hlm. 91), dimulai dari prosedur pemilihan lokasi dan diakhiri dengan kemandirian masyarakat. Masing-masing tahapan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1) Langkah 1: Memilih lokasi

Masyarakat, pihak-pihak yang terafiliasi, dan lembaga menyepakati kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan lokasi. Menetapkan kriteria sangat penting untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih dipilih secermat mungkin dan tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai sesuai rencana.

### 2) Langkah 2: Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi

Tujuan dari sosialisasi adalah untuk terlibat dalam kegiatan komunikasi yang menumbuhkan wacana komunal. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang Sosialisasi akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai inisiatif dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di dalam masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan. Karena kemampuannya untuk mengukur antusiasme masyarakat dalam berperan serta dan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan, maka proses sosialisasi menjadi sangat penting.

### 3) Langkah 3: Prosedur pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah tujuan mendasar dari pemberdayaan masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan melakukan hal-hal berikut selama proses tersebut:

- a) Survei kondisi peDesaan dengan partisipasi. Menentukan dan mengevaluasi peluang, masalah, dan potensi daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan masyarakat untuk mengenali dan menilai keadaan mereka, termasuk peluang dan tantangan;
- b) Membangun tim. Membuat rencana kegiatan kelompok berdasarkan temuan-temuan penilaian;
- c) Membuat dan melaksanakan rencana kegiatan. mempraktikkan rencana kegiatan kelompok, seperti yang dibuat bekerja sama dengan pendamping untuk membantu fasilitasi, dan kemudian mempraktikkan rencana-rencana tersebut dalam kegiatan nyata dengan tetap menjaga kesadaran akan tujuan awal dan realisasinya. Tindakan ini melibatkan pemberian informasi kepada semua orang tentang pelaksanaan dan kemajuan kegiatan dan, jika diperlukan, menerapkan modifikasi yang sesuai;
- d) Pemantauan dan penilaian dengan partisipasi. memantau partisipasi yang sedang berlangsung

dalam proses dan hasil kegiatan (Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif). Pada setiap tingkat pemberdayaan masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif yang ekstensif dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut mencapai tujuannya. Pemantauan dan evaluasi partisipatif adalah proses mengevaluasi, memeriksa, dan melacak kegiatan, termasuk proses implementasi serta hasil dan dampaknya, dalam rangka menetapkan, jika diperlukan, proses perbaikan.

#### 4) Tahap 4: Kemandirian masyarakat

Arah kemandirian masyarakat adalah dalam bentuk bantuan untuk membekali masyarakat agar mampu mengelola kegiatan mereka sendiri, sesuai dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, yang berupaya memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemberdayaan masyarakat secara langsung terkait dengan penyebab eksternal dan internal. Sementara elemen internal memainkan peran penting dalam hubungan ini sebagai sarana pengorganisasian diri masyarakat, pengaruh eksternal juga perlu dipertimbangkan. Seiring dengan proses pemberdayaan masyarakat, tim fasilitator yang beragam harus hadir. Salah satu elemen luar dalam pemberdayaan masyarakat adalah tim ini. Pada awalnya, tim ini memainkan peran yang sangat aktif dalam proses tersebut, namun seiring berjalannya waktu, fungsinya akan semakin berkurang hingga masyarakat dapat melakukan kegiatannya sendiri.

Proyek tim pemberdayaan masyarakat secara bertahap akan berkurang dan pada akhirnya tidak ada lagi. Tim fasilitator akan terdiri dari pengurus kelompok dan individu-individu lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kesepakatan bersama yang telah dibuat di awal program dengan anggota masyarakat akan menentukan kapan tim fasilitator berhenti.

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan beberapa langkah berikut, menurut Puji Hadiyanti (2008, hlm. 92-93).

##### 1) Tahap awal memilih tempat

Masyarakat, pihak-pihak yang berafiliasi, dan lembaga menyepakati kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan lokasi. Menetapkan standar ini sangat penting untuk mencapai tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dan memastikan bahwa lokasi yang dipilih sudah tepat.

## 2) Tahap kedua sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan untuk menumbuhkan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat adalah mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat. Kesadaran program di dalam masyarakat dan pihak-pihak terkait ditingkatkan melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan berperan serta dipastikan melalui proses sosialisasi.

## 3) Tahap ketiga dari proses pemberdayaan masyarakat

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap ini: Pemantauan dan evaluasi partisipatif, pembentukan kelompok, perumusan dan pelaksanaan rencana kegiatan, dan penilaian keadaan Desa adalah empat kegiatan pertama.

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan standar hidup adalah tujuan utama pemberdayaan masyarakat. Bersama-sama, anggota masyarakat akan:

- a) mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, kemungkinan, dan potensi;
- b) membuat rencana kegiatan kelompok berdasarkan temuan studi;
- c) melaksanakan rencana kegiatan kelompok; dan
- d) secara konsisten mengawasi jalannya kegiatan dan hasilnya Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif.

Alat visualisasi dan strategi yang mendorong percakapan masyarakat dan membantu proses pemberdayaan sering digunakan dalam semua kegiatan. Diharapkan dengan menggunakan strategi ini, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dapat dilakukan secara metodis. Metode evaluasi ini sering disebut sebagai *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Langkah penting dalam perbaikan proses, pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan telah tercapai. Metode, hasil, dan pengaruh dari proses pemberdayaan adalah beberapa aspek yang dilacak dan dinilai.

## 4) Fase keempat kemandirian kolektif

Dalam upaya meningkatkan kondisi kehidupan, masyarakat memberdayakan dirinya sendiri melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan yang mengarah

pada kemandirian bersama. Hal ini menyiratkan bahwa peran tim pemberdayaan masyarakat secara bertahap akan berkurang dan pada akhirnya tidak ada lagi. Pengurus kelompok atau individu lain yang dianggap mampu oleh masyarakat akan menjalankan tugas fasilitator dari tim pemberdayaan kelompok. Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempraktikkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus menerus. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seringkali membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Namun, Wilson (dalam Sri Handayani 2019: 59-62) berpendapat bahwa inisiatif pemberdayaan organisasi untuk setiap anggotanya terdiri dari sebuah siklus tindakan.

Langkah *pertama* dalam menjawab tuntutan pemberdayaan adalah mendorong keinginan individu untuk menjadi lebih baik dan mengubah diri mereka sendiri. Setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki hal ini tidak akan mendapatkan dukungan, empati, atau keterlibatan masyarakat. *Kedua*, mendorong keberanian dan kesiapan untuk memilih pemberdayaan daripada kesenangan/ketidaksenangan dan/atau hambatan yang dirasakan untuk membawa perubahan dan kemajuan yang diinginkan. *Ketiga*, mendorong keterbukaan untuk mengambil bagian dalam inisiatif yang memperkuat masyarakat dan meningkatkan kondisi mereka. *Keempat*, mengambil peran yang lebih besar atau mengambil bagian dalam inisiatif pemberdayaan yang dianggap dapat memberikan keuntungan atau perbaikan. *Kelima*, tumbuhnya peran dan komitmen terhadap inisiatif pemberdayaan, yang terlihat dari munculnya motivasi perubahan. *Keenam*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi inisiatif pemberdayaan. *Ketujuh*, mengembangkan tindakan pemberdayaan baru yang meningkatkan kompetensi untuk menciptakan perubahan (Sri Handayani 2019: 59-62).

### **c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Suaib (2023) berpendapat bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan kolektif masyarakat, terutama kelompok-kelompok lemah yang tidak memiliki kekuatan karena faktor internal seperti pandangan mereka sendiri atau faktor eksternal seperti ditindas oleh sistem sosial yang tidak adil.

Memahami kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang mereka hadapi merupakan hal yang sangat penting untuk memahami pemberdayaan.

Kelompok-kelompok yang termasuk dalam kategori lemah atau tidak berdaya ini meliputi:

- 1) Kelompok-kelompok yang secara struktural lemah, terlepas dari kelas, gender, atau etnis mereka.
- 2) Populasi rentan tertentu, termasuk orang tua, anak-anak, orang dewasa muda, orang cacat, homoseksual dan lesbian, dan komunitas yang terpinggirkan.
- 3) Kelompok rentan secara individu, seperti mereka yang berurusan dengan masalah keluarga atau pribadi (Suaib, 2023:31).

Franklin (2015: 1326) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dalam Irmawati pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung pembangunan manusia yang sejati dan komprehensif dari para penjahat dan petani kecil yang terpinggirkan, lemah, dan rentan; buruh tani dari masyarakat miskin kota; masyarakat adat yang terbelakang; para pencari kerja; penyandang disabilitas; dan kelompok-kelompok perempuan yang terpinggirkan atau terdiskriminasi.
- 2) Menyediakan sarana bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjadi lebih mandiri, namun tetap memungkinkan mereka untuk terlibat dalam masyarakat.

Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat, menurut Irmawati, "Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menumbuhkan rasa percaya diri sehingga para anggota dapat menyuarakan pikiran dan ambisi mereka dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hal ini juga membantu anggota untuk hidup mandiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kemandirian dalam memecahkan masalah, dan mengekspresikan diri."

#### **d. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Suaib (2023) mencantumkan empat prinsip - partisipasi, kesetaraan, kemandirian atau kemandirian, dan keberlanjutan - yang sering diterapkan untuk keberhasilan proyek pemberdayaan. Myang memberikan penjelasan sebagai berikut:

##### 1) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan atau kesamaan derajat antara masyarakat dan lembaga yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan konsep utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan menciptakan sistem untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan keterampilan, terciptalah hubungan yang setara. Masing-masing menyadari kelebihan dan kekurangan pihak lain, sehingga terjadi proses pembelajaran timbal balik.

##### 2) Keterlibatan

Program pemberdayaan partisipatif yang dirancang, dilaksanakan, diawasi, dan dinilai oleh masyarakat adalah program yang dapat mendorong kemandirian masyarakat. Namun, untuk sampai pada titik ini dibutuhkan waktu dan program pendampingan dengan mentor yang benar-benar berdedikasi pada pemberdayaan masyarakat.

##### 3) Kemandirian atau keswadayaan

Konsep kemandirian adalah menghargai dan mendahulukan kemampuan masyarakat dari pada bantuan dari luar. Menurut teori ini, masyarakat miskin tidak dipandang sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan (the have not), tetapi lebih sebagai orang yang memiliki kemampuan terbatas (the have little). Mereka memiliki tenaga dan kemauan, mahir menabung, memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang keterbatasan yang dihadapi, sadar akan kondisi lingkungan, dan memiliki standar komunitas yang telah lama ada. Semua ini perlu diselidiki dan digunakan sebagai sumber daya dasar untuk proses pemberdayaan.

Bantuan materi dari pihak lain harus dipandang sebagai dukungan agar bantuan tersebut tidak benar-benar menurunkan tingkat kemandirian. Pertumbuhan pemberdayaan masyarakat dipandu oleh gagasan "mulai dari apa yang mereka

miliki". Bahkan, dukungan teknis perlu dirancang untuk menghasilkan peningkatan kapasitas sehingga pada akhirnya masyarakat, setelah mengorganisir diri mereka sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, dapat mengambil alih administrasi.

#### 4) Ekologis

Program-program pemberdayaan harus direncanakan untuk bertahan lama, bahkan ketika peran fasilitator pada awalnya lebih diutamakan daripada peran masyarakat. Namun, karena masyarakat sudah bisa menangani urusannya sendiri, maka tugas pendampingan secara bertahap akan berkurang, bahkan dihilangkan.

Sementara itu, Mathews menyatakan bahwa "prinsip adalah pernyataan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten" dalam Sri Handayani (2019: 4). Akibatnya, ide tersebut akan berlaku secara luas, dianggap luas, dan didukung oleh sejumlah pengamatan yang dilakukan dalam berbagai keadaan. Oleh karena itu, "prinsip-prinsip" dapat berfungsi sebagai kerangka kerja fundamental yang tepat untuk membangun pelaksanaan tugas-tugas yang ada.

Prinsip-prinsip pemberdayaan, yang berasal dari gagasan pemberdayaan sebagai sistem pendidikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan: tindakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dalam melakukan atau menerapkan sesuatu. Karena anak-anak akan terlibat dalam proses belajar melalui "berbuat" yang akan bertahan lebih lama dan mencakup penerapan ide, perasaan, dan kemampuan mereka;
- 2) Efek: kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat harus memiliki dampak positif atau konstruktif, karena emosi seperti kebahagiaan atau ketidakpuasan akan berdampak pada kesediaan mereka untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan di masa depan;
- 3) Asosiasi: Karena orang suka mengasosiasikan atau menghubungkan tindakan mereka dengan kegiatan atau peristiwa lain, maka setiap kegiatan pemberdayaan perlu dikaitkan dengan kegiatan lain. Misalnya, melihat cangkul menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menyiapkan lahan

dengan baik; melihat tanaman yang kerdil atau tidak produktif mengingatkan masyarakat bahwa upaya pemupukan telah dilakukan, dll.

#### **e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Penulis, Sri Handini (2019), mengulas berbagai taktik pemberdayaan masyarakat (Suharto, 1997) dan mengusulkan lima langkah utama yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, terutama melalui lobi dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Langkah-langkah ini meliputi:

##### 1) Inspirasi

Setiap keluarga dalam hubungan ini harus dapat memahami pentingnya persatuan, keterlibatan sosial, dan kekuatan dengan mengetahui hak-hak hukum mereka sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Pembentukan kelompok-kelompok, yang merupakan kerangka kerja kelembagaan yang sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif pengembangan masyarakat di Desa atau kelurahan, harus dibina di setiap rumah. Kelompok-kelompok ini kemudian terinspirasi untuk menggunakan aset dan keterampilan mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

##### 2) Meningkatkan kesadaran dan memberikan keterampilan.

Meningkatkan kesadaran dapat dilakukan dengan menerapkan pendidikan dasar, kesehatan yang lebih baik, imunisasi, dan praktik sanitasi. Pendekatan partisipatif dapat digunakan untuk membangun keterampilan kejuruan. Informasi dari luar dapat dipadukan dengan pengetahuan lokal, yang sering kali diperoleh melalui pengalaman. Melalui jenis pelatihan ini, masyarakat miskin dapat belajar bagaimana menghidupi diri mereka sendiri atau mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan di luar daerah mereka.

##### 3) Pengendalian diri

Setiap organisasi masyarakat harus memiliki otonomi untuk memilih pemimpinnya sendiri dan merencanakan kegiatannya sendiri, termasuk mengadakan pertemuan, mengelola dokumentasi dan pelaporan, mengelola kepemilikan masyarakat, menjalankan kredit dan tabungan, dan menyelesaikan konflik. Mereka dapat memperoleh bantuan awal dari fasilitator luar dalam

menciptakan sistem. Setelah itu, kelompok tersebut dapat diberdayakan secara penuh untuk mengelola dan menjalankan sistem.

#### 4) Mobilisasi sumber daya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, strategi untuk mengumpulkan sumber daya individu melalui tabungan yang konsisten dan kontribusi sukarela-dengan tujuan akhir menghasilkan modal sosial-harus dikembangkan. Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang unik yang jika digabungkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi secara signifikan. Perhatian harus diberikan ketika menciptakan sistem untuk berbagi, mendistribusikan, dan memanfaatkan sumber daya untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Hal ini akan menjamin kepemilikan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

#### 5) Pengembangan dan pembangunan jaringan.

Selain membentuk kelompok-kelompok swadaya, para anggota harus diberi alat yang lebih baik untuk menciptakan dan mengelola jaringan dengan sistem sosial lain di komunitas mereka. Jaringan ini memainkan peran penting dalam memperluas dan menawarkan beragam akses terhadap peluang dan sumber daya untuk memberdayakan masyarakat miskin;

Selain itu, strategi pemberdayaan lima P-Pemberdayaan, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan-dapat digunakan untuk mengimplementasikan lima komponen pemberdayaan masyarakat (Suharto, 1997).

- 1) Memampukan: Hal ini mengacu pada penciptaan lingkungan atau iklim yang paling mendukung pengembangan potensi masyarakat miskin. Masyarakat miskin harus mampu mengatasi rintangan struktural dan kultural melalui pemberdayaan;
- 2) Penguatan: dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- 3) Perlindungan: dengan melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, dari penindasan oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (terutama yang tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan melarang eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah, pemberdayaan harus

mampu mengembangkan semua keterampilan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang mendukung kemandirian mereka. Tujuan pemberdayaan haruslah mengakhiri segala bentuk dominasi dan diskriminasi yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kurang mampu;

- 4) Dukungan: Hal ini mengacu pada pemberian arahan dan bantuan agar masyarakat kurang mampu dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya dalam kehidupan. Untuk mencegah masyarakat miskin menjadi semakin rentan dan terpinggirkan, maka pemberdayaan harus dapat membantu mereka;
- 5) Pemeliharaan: tindakan menjaga lingkungan yang mendukung untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan otoritas di antara berbagai kelompok sosial. Agar setiap orang dapat mengambil keuntungan dari prospek komersial, pemberdayaan harus mampu menjaga perdamaian dan keseimbangan. (Sri Handini, 77-80, 2019)

## **7.1.2 Badan Usaha Milik Desa**

### **a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUM DESA adalah badan usaha dalam Herdiat dan Kurniawan (2021) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015). Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BUM DESA dicirikan sebagai Badan Usaha Milik Desa yang didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi Desa. BUM DESA adalah badan usaha yang digerakkan oleh masyarakat yang didasarkan pada inisiatif dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, BUM DESA merupakan usaha di tingkat Desa yang dimulai oleh, dikelola oleh, dan untuk melayani masyarakat Desa (Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 4).

Menurut beberapa ahli, BUM DESA adalah sebuah badan usaha komersial yang dijalankan oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya mengembangkan kohesi sosial dan meningkatkan ekonomi lokal dengan membentuk komunitas yang kohesif berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (Maryunani, 2008: 35).

Badan Usaha Milik Desa, atau disingkat BUM DESA, adalah lembaga usaha yang berasal dari Desa, dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat, serta dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa itu sendiri. Hal ini merupakan kesimpulan penulis berdasarkan tiga definisi yang diberikan di atas. (Kurniawan & Herdiat, 2021: 153-154)

#### **b. Tujuan Berdirinya Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Hasanah dkk. (2021: 22-23), tujuan BUMDes Salah satu tugas BUMDes adalah meningkatkan taraf hidup pengurus, komisaris, dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan organisasi, yaitu membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes di Desa-Desa tentu saja akan berdampak pada pendapatan penduduk setempat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes, yang terutama berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk Desa. Diharapkan BUMDes akan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja dari Desa sekitar, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa tersebut.

Hasanah (2019) menyatakan bahwa pemerintah menciptakan BUMDes dengan beberapa tujuan. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
- 2) Meningkatkan pendapatan awal Desa
- 3) Menumbuhkan lebih banyak kecerdikan dan usaha bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat miskin
- 4) Mendorong pertumbuhan usaha mikro di sektor tidak resmi

BUMDes diinisiasi oleh masyarakat setempat, yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi dusun. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha yang akan diwujudkan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memajukan masyarakat setempat. Oleh karena itu, BUMDes harus dapat memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya dalam tujuh hal utama, termasuk:

- 1) BUMDes dimiliki dan dikendalikan secara bersama-sama oleh Desa
- 2) Masyarakat (59%) dan Desa (51%) menyediakan modal usaha melalui penyertaan modal (kontribusi atau saham).
- 3) Beroperasi berdasarkan filosofi perusahaan yang berasal dari adat istiadat dan pengetahuan lokal, atau "kearifan lokal"; d) Operasi perusahaan didasarkan pada kemungkinan dan hasil dari data pasar.
- 4) Kebijakan Desa bertujuan untuk menggunakan keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pemerintah Desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah melakukan pendampingan;
- 6) Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara bersama-sama mengelola operasionalisasi. (Hasanah, dkk 2021:25-26)

### **c. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa**

Dalam penyelenggaraan BUMDes menurut Hasan & Gusnardi, (2018) terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam meningkatkan perkembangan BUMDes. Berikut merupakan prinsip-prinsip BUMDes.

- 1) Kooperatif: mengharuskan semua konstituen berpartisipasi aktif dalam pengelolaan BUMDes, yang mengarah pada kerja sama yang baik;
- 2) partisipatif: setiap konstituen manajemen BUMDes memberikan dukungan dan memberikan kontribusi sukarela untuk meningkatkan bisnis;
- 3) emansipatif: semua konstituen manajemen BUMDes diperlakukan setara, tanpa memandang keanggotaan kelompok, suku, ras, atau agama;
- 4) Transparan: Karena pengelolaan BUMDes menyangkut kepentingan umum masyarakat, maka pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan transparan;

- 5) Akuntabel: Semua kegiatan sistemik dan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) Keberlanjutan: Masyarakat dapat mengembangkan dan mempertahankan kegiatan usaha BUMDes.

Selain pendapat di atas, L.K. Arifah mengemukakan beberapa prinsip BUMDes sebagai berikut:

- 1) Setiap warga Desa memiliki akses terhadap BUMDes dan dapat berpartisipasi dalam semua kegiatannya.
- 2) Bukan semata-mata bersifat komersial, BUMDes lebih bersifat sosial (kewirausahaan sosial).
- 3) Diperlukan pihak independen untuk mengawasi BUMDes.
- 4) Pengelola tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan Desa.
- 5) Alih-alih mengambil alih operasi masyarakat Desa yang sudah beroperasi, BUMDes harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas bisnis mereka. (L.K. Arifah 2019: 42-43)

#### **d. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

Pengelolaan BUMDes, dalam Hasanah dkk, (2021:28-30) menurut PKDSP (2007), harus dilakukan dengan basis anggota dan mekanisme swadaya yang dikelola secara otonom dan profesional, serta harus menganut prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, informasi yang rinci dan dapat dipercaya tentang karakteristik lokal—seperti ciri-ciri sosial budaya masyarakat dan potensi pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan—diperlukan untuk membangun BUM Desa. Memprioritaskan perolehan dana dari masyarakat dan Pemdes sangat penting bagi BUM Desa, sebuah organisasi komersial yang didirikan atas inisiatif masyarakat dan didedikasikan untuk kemandirian. Namun, bukan berarti BUMDes tidak dapat mengumpulkan uang dari sumber lain, termasuk Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, atau bahkan meminjamkan uang kepada orang lain selama mereka mematuhi peraturan dan hukum. Peraturan Daerah (Perda) tidak diragukan lagi akan mengatur pembatasan BUMDes lebih lanjut. BUMDes didirikan dengan tujuan tertentu. Menyediakan layanan untuk usaha yang menguntungkan, terutama bagi masyarakat

miskin di daerah peDesaan, mengurangi praktik ijon dan pembungaan uang, membangun prospek bisnis yang adil, dan meningkatkan pendapatan masyarakat peDesaan adalah beberapa cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Masyarakat harus diajarkan untuk menabung sebagai sebuah kebiasaan oleh BUMDes untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa yang mandiri. Ini adalah persyaratan penting lainnya. Diperkirakan bahwa pihak ketiga akan terus terlibat dalam pengelolaan BUMDes, yang akan berdampak pada masyarakat Desa dan masyarakat yang lebih besar (kabupaten). Oleh karena itu, inisiatif masyarakat untuk membangun BUMDes harus tetap mempertimbangkan kemampuan Desa untuk mempertahankan potensinya, kemampuan membayar pajak, dan kepatuhan warga terhadap persyaratan hukum. Masing-masing membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten. Ciri-ciri masyarakat Desa yang membutuhkan layanan utama BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Desa yang selain memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan, juga menggantungkan hidupnya pada pertanian dan terlibat dalam usaha komersial tidak resmi.
- 2) Masyarakat Desa yang berpenghasilan sangat rendah yang sulit menyisihkan sebagian pendapatannya untuk modal tambahan yang diperlukan untuk pengembangan usaha.
- 3) Banyak masyarakat Desa yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri akhirnya jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki lebih banyak sumber daya.
- 4) Masyarakat peDesaan yang kegiatan ekonominya biasanya diperparah oleh sistem pemasaran yang memberikan kemampuan kepada pemilik modal untuk menurunkan harga, sehingga memeras dan menikmati sebagian besar tenaga kerja yang dihasilkan oleh masyarakat peDesaan (PKDSP, 2007).

### **E. Jenis Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Hasanah dkk. (2021) mengklasifikasikan jenis usaha di BUMDes ke dalam enam kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. **Bisnis Sosial:** Dalam BUMDes, bisnis sosial adalah bisnis yang menawarkan layanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, meskipun menghasilkan keuntungan yang kecil, bisnis ini membantu masyarakat setempat dalam arti sosial.
- b. **Perusahaan Uang:** BUMDes mengoperasikan perusahaan uang yang menyediakan dukungan keuangan bagi masyarakat Desa dengan bunga lebih rendah dari bunga yang diperoleh penduduk setempat dari bank tradisional atau rentenir Desa.
- c. **Usaha Persewaan:** BUMDes menjalankan usaha persewaan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan menghasilkan pendapatan bagi Desa.
- d. **Lembaga Perantara:** Untuk memfasilitasi petani menjual produknya ke pasar, BUMDes bertransformasi menjadi "lembaga perantara" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar. Sebagai alternatif, BUMDes menawarkan layanan kepada perusahaan lokal dan penduduk.
- e. **Perdagangan:** BUMDes mengoperasikan perusahaan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperluas jangkauan pasar.
- f. **Usaha Patungan:** BUMDes berfungsi sebagai "usaha patungan" atau sebagai perusahaan induk dari unit-unit usaha yang sudah ada di Desa. BUMDes mengatur dan menyusun setiap unit usaha mandiri sedemikian rupa sehingga dapat bekerja sama satu sama lain untuk mengembangkan usaha bersama.

## **F. Kemandirian Dalam Berwirausaha Masyarakat**

Menurut pendapat Lutfiansyah (dalam Suryana S, F, dkk 2020, hlm. 52), hasil dari program kemandirian wirausaha masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain tanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, memiliki etos kerja, disiplin, dan berani mengambil resiko.

### **a. Tanggung jawab**

Mengatakan bahwa rasa tanggung jawab seseorang berasal dari kemampuannya untuk memenuhi tugas yang telah diberikan kepadanya. Lebih jauh lagi, ia dapat menggunakan hak hidupnya secara efektif berkat rasa keinginan dan kompetensi ini. Tidak dapat dihindari untuk mendiskusikan objek dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan standar perilaku yang berlaku dan diterima secara luas di masyarakat.

### **b. Tidak bergantung pada orang lain**

Pada dasarnya, hak ini memiliki keistimewaan yang sama dengan hak-hak dasar, sebagian besar kebal terhadap intervensi dari luar, dan dapat dipertahankan sepenuhnya karena kedudukan hukumnya yang mapan. Seseorang dengan pola pikir otonom tidak akan menggunakan barang milik orang lain untuk menuntut hak-hak ini atas nama mereka.

### **c. Mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal**

Pada dasarnya, mereka memiliki hak-hak yang tidak bergantung pada hak-hak relatif dan fundamental orang lain, dan hak-hak tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas, yang memungkinkan mereka untuk dilindungi dengan kuat. Individu yang mandiri tidak akan memanfaatkan orang lain untuk memajukan agendanya sendiri atau mengubahnya menjadi aset. Dalam memenuhi kebutuhan finansial, hal ini juga terlihat jelas dalam hal kesejahteraan keluarga, pekerjaan, dan pendapatan keluarga.

### **d. Memiliki etos kerja**

Pada karakteristik keempat adalah seorang individu dapat dikatakan mandiri bila memilih kemauan dalam bekerja yang baik dan memiliki etos kerja yang tinggi (maksudnya sangat bekerja keras). Hal ini ditandai oleh adanya ketekunan dalam

bekerja, semangat kerja yang tinggi, memiliki prinsip keseimbangan kerja antara pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.

e. Disiplin

Mengatakan bahwa karakteristik selanjutnya yang dimiliki oleh individu yang mandiri adalah mereka yang memiliki sikap konsisten dengan komitmen tentang pekerjaan, jika pekerjaan tersebut dapat memberi manfaat bagi diri pribadinya maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan Lutfiansyah serta melihat kondisi dilapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedisiplinan dari anggota Kopmu DT sudah baik, karena mereka selalu konsisten dalam mengerjakan usahanya, sehingga anggota mendapatkan kebermanfaatn dari hasil usaha yang dijalankan.

f. Berani mengambil risiko

Karakteristik wirausaha menurut Alma (2001, hlm. 39) mempunyai ciri percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi masa depan. Seperti yang dijelaskan oleh Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) bahwa orang yang mandiri tidak pernah merasa takut terhadap kegagalan dalam usahanya. Karena rasa takut dalam diri individu akan sangat mempengaruhi pula terhadap sikap dan perilakunya, termasuk rasa takut dapat juga menjadi penghambat seorang individu untuk gesit bergerak dalam usahanya.

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

a) Artikel "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang" ditulis oleh Dipha Rizka Humaira pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif deskriptif. Metode wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan secara langsung digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena kesadaran masyarakat terhadap program BUMDes masih rendah, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program masih lemah. Pemerintah Desa telah melakukan proses seleksi dengan baik, yaitu melalui

tiga tahap: diskusi khusus di dalam Desa, bidang usaha BUMDes, dan musyawarah khusus. Karena beberapa orang tidak menganggap pemerintah Desa Purwasari menyelenggarakan sosialisasi, maka pemerintah Desa tidak melakukan yang terbaik pada tahap sosialisasi ini. Pemerintah Desa berkinerja sangat baik pada tahap pemberdayaan ini karena bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyediakan infrastruktur, pelatihan, dan fasilitas berupa posyandu, balai musyawarah, atau gedung serbaguna. Pemerintah Desa efektif dalam tahap kemandirian ini karena membantu masyarakat untuk pulih dan menyalurkan dampak pemberdayaan melalui bisnis.

b) Artikel "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo" ditulis oleh Ayyub Tabah Pangestu pada tahun 2020. Data primer dan sekunder merupakan sumber data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai strategi pengumpulan data. Melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, pendekatan interaktif digunakan dalam analisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal yang lebih mandiri. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan dukungan keuangan untuk promosi dan pengembangan potensi perusahaan milik masyarakat.

c) "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" adalah judul penelitian Fitria, 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan kualitatif. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur menjadi subjek penelitian ini. Proses tersebut meliputi penyediaan modal bagi masyarakat, pemasaran, kemitraan, dan penguatan kelembagaan. Dampak dari BUMDes telah diamati untuk meningkatkan modal usaha, produksi masyarakat, kemudahan mendapatkan fasilitas pertanian, pendapatan masyarakat, dan kehidupan sosial.

d) Nur Hamid, 2021 dengan subjudul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara lisan dari beberapa hasil data. Purposive sampling digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data sampel. Sepuluh orang menjadi sampel, sesuai dengan kriteria penulis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa membuka beberapa unit usaha-pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga, dan unit jasa lainnya merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengelolaan BUMDes sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu taktik yang berhasil dalam memaksimalkan potensi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukoharum.

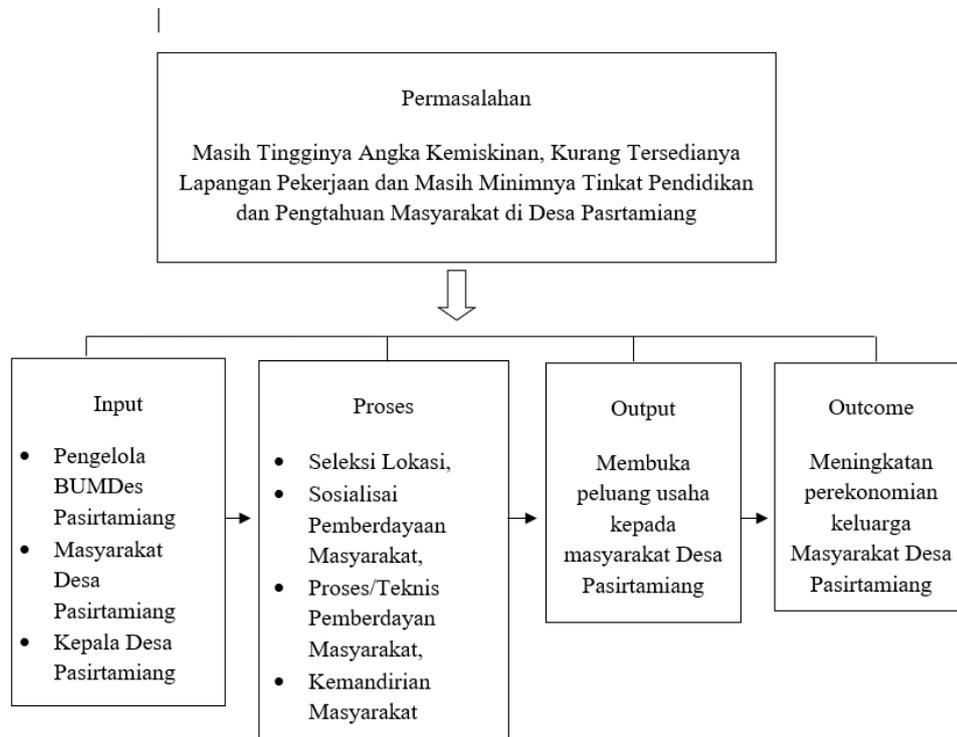
e) Penelitian tahun 2020 "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep" dilakukan oleh Ristiana Ristiana dan Amin Yusuf. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dua orang manajer BUMDES berperan sebagai informan kunci dalam penelitian ini, sementara empat orang anggota BUMDES lainnya berperan sebagai informan pelengkap. Strategi yang digunakan untuk memastikan keaslian data adalah dengan melakukan triangulasi sumber dan metode. Strategi untuk memastikan keaslian data yang menggunakan triangulasi sumber dan metode. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi digunakan dalam prosedur analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh tahapan dalam proses pemberdayaan: perencanaan, penilaian alternatif program atau kegiatan, pelaksanaan rencana aksi, implementasi program atau kegiatan, evaluasi, dan terminasi. Pendorong utama pemberdayaan adalah sumber daya alam yang melimpah, dukungan masyarakat dan pemerintah, serta niat dan semangat individu yang diberdayakan. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang BUMDES, minimnya anggaran, dan kurangnya penerimaan

masyarakat terhadap pentingnya BUMDES adalah masalah yang menghambat kemajuan.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2019, p. 95), kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai elemen yang telah ditetapkan sebagai masalah yang signifikan. Hubungan antar variabel yang akan diteliti akan dijelaskan secara teoritis dengan kerangka berfikir yang kuat. Teori dan hubungan antara beberapa variabel yang akan diteliti dijelaskan dalam kerangka konseptual ini. Penelitian ini membahas bagaimana program BUMDes memberdayakan masyarakat di Desa Pasirtamiang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini memunculkan beberapa diskusi, salah satunya adalah bagaimana memperkuat potensi Desa melalui BUMDes.

Pengelola BUMDes Maju Jaya, kepala Desa Pasirtamiang, dan masyarakat Desa Pasirtamiang memberikan input pada penelitian ini. Input ini kemudian menjadi proses dalam penelitian, yaitu dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat Desa Pasirtamiang sebagai proses untuk menghasilkan output dan outcome di dalamnya. Peningkatan perekonomian masyarakat Desa Pasirtamiang merupakan output atau hasil langsung dari sebuah kegiatan yang dilakukan, sedangkan outcome sendiri adalah meningkatnya peluang usaha bagi masyarakat Desa, sehingga memudahkan masyarakat untuk memiliki peluang usaha sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Pasirtamiang.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

#### 2.4 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini yaitu :

- a) Bagaimana tahapan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- b) Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian berwirausaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.